

INTISARI

KAJIAN KOMPARATIF MENGENAI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA ANTARA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

Oleh: Dony Harapan Limbong¹ dan Supriyadi²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan pengaturan mengenai pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pidana penjara antara narapidana tindak pidana korupsi dengan narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan responden serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan pengaturan mengenai pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaannya, adapun persamaannya yakni dalam kegiatan keregistrasian dan klasifikasi, dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan, dalam hal mengenai hak dan kewajiban, dan dalam hal pengamanan dan tata tertib, sedangkan perbedaannya yakni terkait pemberian izin keluar dalam rangka pembinaan dan cuti mengunjungi keluarga serta terkait pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Sementara itu, perbandingan pelaksanaan pidana penjara antara narapidana tindak pidana korupsi dengan narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan juga dengan melihat persamaan dan perbedaannya, persamaan dan perbedaan tersebut pada dasarnya serupa dengan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan mengenai pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Penjara, Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narapidana Tindak Pidana Umum, Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Mahasiswa Strata-1 (S-1) pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dony.harapan.l@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Hukum Pidana pada Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF IMPRISONMENT EXECUTION BETWEEN CORRUPTION INMATES AND ORDINARY INMATES AT PENITENTIARY CLASS IIA YOGYAKARTA

By: Dony Harapan Limbong³ and Supriyadi⁴

This legal research aims to analyse the comparison of imprisonment regulation between corruption inmates and ordinary inmates based on Indonesia law and also to examine the comparison of imprisonment execution between corruption inmates and ordinary inmates at Penitentiary Class IIA Yogyakarta.

The research in this legal writing is normative empirical approach with descriptive analytic. The primary data is retrieved from the interview with the correspondent and respondent. Meanwhile, the secondary data is retrieved from literature study. The resulted data is analysed with qualitative method and comparative approach.

According to the research, it can be concluded that the comparison of imprisonment regulation between corruption inmates and ordinary inmates based on Indonesia law is reflected through the similarities and differences. The similarities are in the registration and classification, coaching and training program, rights and obligations, and order. Whereas the differences are related to the permission to leave in case of coaching, training, and visit the family. Other differences are related to the granting of remission, assimilation, parole, conditional leave, and leave before being release. Furthermore, the research shows that the implementation at Penitentiary Class IIA Yogyakarta is in line with the regulation.

Keywords: Imprisonment, Corruption Inmates, Ordinary Inmates, Penitentiary.

³ Undergraduate Student of Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dony.harapan.l@mail.ugm.ac.id).

⁴ Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).